DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL ..... **-**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN ..... **i**
ABSTAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
الملخص ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS ..... **v**
LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 15
D. Kegunaan Penelitian 16
1. Kegunaan Teoritis 16
2. Kegunaan Praktis 16
E. Kerangka Pemikiran 16
1. *Grand Theory*: Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) 17
2. *Middle Theory*: Teori Sistem Peradilan Pidana 19
3. *Applied Theory*: Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **29**
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 29
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana 34
1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana 34
2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana yang Relevan dengan Pembuktian 36
3. Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan 39
C. Tinjauan tentang Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana 40
1. Pengertian dan Fungsi Pembuktian dalam Hukum Pidana 40
2. Sistem Pembuktian Hukum Pidana 43
3. Dasar Hukum: Pasal 183 KUHAP 53
4. Syarat Objektif: Sekurang-kurangnya Dua Alat Bukti yang Sah 55
5. Syarat Subjektif: Keyakinan Hakim 56
6. Sifat Kumulatif Kedua Syarat serta Konsekuensi Yuridisnya 57
7. Alat-Alat Bukti yang Sah menurut Pasal 184 KUHAP 58
8. Prinsip-Prinsip Penilaian Alat Bukti 69
D. Tinjauan tentang Surat Dakwaan dan Mekanisme Pembuktiannya 76
1. Pengertian, Fungsi, dan Syarat Sah Surat Dakwaan 76
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan serta Logika dan Strategi Penyusunan Dakwaan Berjenjang 79
3. Mekanisme Pemeriksaan Dakwaan Berjenjang, Pembuktian oleh Hakim dan Konsekuensi Yuridisnya 83
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi 87

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Pengertian, Karakteristik, dan Perkembangan Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia..... 87
2. Unsur-Unsur Delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Mekanisme Pembuktian Unsur Melawan Hukum dan Kerugian Keuangan Negara..... 90
3. Pembuktian Unsur Subjektif (*Mens Rea*), Sistem Pembuktian Terbalik dan Mekanisme Pembuktian oleh Hakim..... 94
F. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch..... 97
1. Tiga Nilai Dasar Tujuan Hukum Gustav Radbruch..... 97
2. Aktualisasi Teori Tujuan Hukum dalam Mekanisme Pembuktian oleh Hakim..... 100

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 103
A. Metode Penelitian dan Pendekatan..... 103
B. Sifat Penelitian..... 105
C. Jenis Dan Sumber Data 106
D. Lokasi Penelitian..... 107
E. Teknik Pengumpulan Data..... 108
F. Teknik Analisis Data..... 110

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 112
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 112
1. Profil Pengadilan Negeri Bandung..... 131
2. Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi..... 114
3. Profil Singkat Perkara yang Diteliti..... 116
B. Pengaturan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* dalam Pembuktian Dakwaan Primair dan Subsidiair 117
1. Dasar Hukum Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*..... 117
2. Konstruksi Dakwaan Subsidaritas dan Prinsip Penilaian Berjenjang. 120
3. Keterbatasan Pengaturan Teknis mengenai Tata Cara Peralihan Dakwaan... 123
C. Penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Menilai Alat Bukti dan Pembuktian Unsur Delik..... 127
1. Temuan dari Studi Putusan..... 127
a. Pertimbangan hukum atas tidak terbuktinya unsur dakwaan primair (Pasal 2)..... 129
b. Pertimbangan hukum atas terbuktinya unsur dakwaan subsidiair (Pasal 3)..... 131
2. Temuan Hasil Wawancara 133
a. Pemahaman hakim tentang Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* dalam dakwaan berlapis..... 134
b. Pertimbangan praktis hakim menilai peralihan dakwaan..... 137
c. Problematika Penerapan Pembuktian oleh Hakim di Lapangan..... 143
3. Pembahasan Studi Putusan Dan Wawancara 145
a. Kesesuaian penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* pada kedua putusan Tindak Pidana Korupsi..... 145
b. Konsistensi antara praktik dalam Dua Putusan Tindak Pidana Korupsi. 149
c. Disparitas antara Norma Hukum Positif dan Praktik Peradilan..... 151

D. Implikasi Penerapan Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel* terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi..... 165
1. Implikasi Yuridis: Kualifikasi Delik, Berat Ringan Pidana, dan Uang Pengganti..... 165
2. Implikasi Terhadap Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi..... 169
3. Implikasi Terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch..... 170

BAB V PENUTUP..... 175

A. Simpulan..... 175

B. Rekomendasi Penelitian..... 177

DAFTAR PUSTAKA..... 179

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG